

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata telah lama dikenal sebagai sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perkembangan sektor pariwisata sangat menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi banyak pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan swasta (Agustina, 2021). Sektor pariwisata yang terdiri dari berbagai jenis kegiatan yang berkaitan dengan wisatawan dan penyedia layanan menjadi salah satu pendorong utama dalam pembangunan daerah. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar terutama pada wisata alam dan budaya. Keindahan alam yang beragam serta kekayaan budaya dan tradisi menjadi kekuatan utama dalam pengembangan wisata. Potensi ini membuka peluang nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Dasar hukum pengelolaan pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Regulasi ini menjadi landasan utama karena mengatur seluruh aspek pariwisata mulai dari pengelolaan sampai promosi. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun (2016) Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Pedoman ini menjadi acuan dalam pengembangan destinasi wisata agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai budaya serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditempatkan sebagai aktor penting untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan wisata. Aturan ini berlaku bagi seluruh destinasi wisata dan memuat standar keberlanjutan mulai dari pengelolaan hingga pengembangan wisata. Kerja sama antar pemerintah, sektor swasta dan komunitas menjadi kunci dalam mendukung pariwisata berkelanjutan (Satrio & Arviana, 2023). Dengan pedoman ini pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengabaikan lingkungan budaya dan kehidupan masyarakat lokal.

Seiring berkembangnya sektor pariwisata banyak desa di Indonesia mulai mengelola potensi alam dan budayanya sebagai upaya mendorong pembangunan daerah. Pariwisata berbasis desa dipilih karena mampu memberi

manfaat ekonomi sekaligus menjaga nilai sosial budaya masyarakat setempat. Dalam konsep ini warga desa terlibat langsung sebagai pelaku utama sehingga dampak ekonomi dan sosial dapat dirasakan nyata oleh masyarakat (Anshori & Enceng, 2024).

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat melalui prinsip otonomi desa. Kewenangan ini dilihat dari upaya pengembangan potensi desa termasuk sektor pariwisata. Pariwisata desa bukan hanya digunakan sebagai sarana rekreasi tetapi sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang mampu membuka lapangan kerja dan memperkuat identitas desa. Dasar hukum kewenangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan hak kepada desa untuk mengelola urusan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat secara mandiri termasuk dalam pengelolaan potensi lokal dan sumber pendapatan desa.

BUMDes memiliki peran penting dalam pengelolaan pariwisata desa. Lembaga ini menjadi penggerak ekonomi yang mengelola potensi wisata secara mandiri dan berkelanjutan. Kehadiran BUMDes juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga pengawasan kegiatan pariwisata (Hastutik et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Revida & Badaruddin, (2023) Pengelolaan desa wisata melalui BUMDes telah terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengelolaan ini juga membuka peluang kerja yang lebih luas bagi warga desa terutama di sektor pariwisata pedesaan.

Desa wisata adalah wilayah pedesaan yang dikembangkan sebagai tujuan pariwisata dengan mengandalkan potensi alam, budaya dan kehidupan masyarakat setempat sebagai daya tarik utama yang saling mendukung dalam keberlanjutan (Mukti, 2022). Dalam praktiknya desa wisata mencakup berbagai unsur kepariwisataan mulai dari atraksi wisata, fasilitas umum dan akomodasi serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi ciri khas destinasi wisata. Dalam pembangunan pedesaan, desa wisata merupakan aset strategis karena bergantung pada potensi lokal desa tersebut. Keunikan alam, tradisi, dan nilai-nilai budaya lokal digunakan sebagai daya tarik utama untuk menarik wisatawan.

Tujuan pengembangan desa wisata bukan hanya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Desa wisata juga berperan menumbuhkan kesadaran bersama pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan budaya lokal. Setiap desa wisata memiliki ciri khas yang tumbuh dari tradisi dan kebiasaan masyarakatnya. Karena itu masyarakat lokal menjadi

pihak utama dalam pengelolaan kegiatan pariwisata. Pengelolaan desa wisata tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan warga setempat dan keberhasilan desa sebagai destinasi wisata sangat ditentukan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Sumber daya manusia menjadi kunci bagi keberlanjutan dan daya saing desa tanpa individu yang kompeten dan komitmen menjaga identitas desa serta keunikan desa dapat menghambat perkembangan pariwisata.

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan desa wisata di Indonesia berlangsung sangat cepat. Program ini didorong oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai strategi pembangunan yang berbasis pada potensi lokal desa. Data Kementerian dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2024), menunjukkan jumlah desa wisata meningkat dari 1.831 desa pada 2018 menjadi lebih dari 3.000 desa. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat desa untuk mengelola potensi alam dan budaya agar memiliki nilai ekonomi melalui sektor pariwisata.

Di balik perkembangan desa wisata muncul berbagai persoalan yang sangat perlu diperhatikan. Meskipun mampu meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan serta menjaga nilai budaya desa. Persaingan antar desa semakin ketat sementara kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas. Pengelolaan yang kurang berkelanjutan beresiko merusak lingkungan dan koordinasi antar pemilik kepentingan yang masih lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya cukup mengandalkan potensi lokal tetapi memerlukan model pengelolaan yang berkelanjutan.

Desa Pupus di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo memiliki destinasi wisata alam bernama Mloko Jajar yang viral semakin diminati wisatawan. Kawasan ini memberikan pemandangan pegunungan dan udara yang sejuk serta lingkungan yang masih terjaga sehingga menarik pengunjung dari berbagai daerah untuk datang. Meski demikian pengelolaan wisata Mloko Jajar masih menghadapi sejumlah tantangan tanpa perencanaan yang matang pengembangan wisata beresiko menimbulkan masalah seperti kerusakan lingkungan dan fasilitas berdampak negatif bagi masyarakat sekitar desa.

Wisata Mloko Jajar tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa. Perkembangan pariwisata membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar baik sebagai pemandu wisata dan pengelola fasilitas. Keterlibatan masyarakat sekitar mendorong tumbuhnya usaha baru yang memanfaatkan potensi desa dan memperkuat perekonomian



setempat. Konsep pengembangan wisata berbasis desa ini memungkinkan masyarakat tidak hanya sebagai objek wisata tetapi juga menjadi subjek yang mengelola dan menentukan arah pengembangan pariwisata. Kualitas masyarakat melalui kesejahteraan dan kualitas pengalaman wisatawan merupakan aspek penting dalam penerapan pariwisata berkelanjutan (Junaid et al., 2022). Wisatawan perlu mendapatkan pengalaman yang mengesankan pada saat melaksanakan kegiatan pariwisata (Winter et al., 2020). Potensi wisata yang dimiliki oleh desa harus dikelola semaksimal mungkin agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakatnya serta dapat mendukung pengelolaan desa (Tou et al., 2021).

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing destinasi wisata. Masyarakat yang memiliki keterampilan dan kapasitas mumpuni mengelola pariwisata secara lebih profesional tanpa meninggalkan nilai kearifan desa. Kualitas sumber daya manusia juga dilihat dari dalam penyediaan fasilitas dan layanan wisata yang baik sehingga wisatawan merasa nyaman selama berkunjung. Pengalaman yang positif ini mendorong tingkat kepuasan wisatawan dan meningkatkan minat untuk melakukan kunjungan (Sandiasa, 2019).

Pengembangan pariwisata berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat sekitar lokasi wisata. Konsep pariwisata berbasis masyarakat menempatkan warga sebagai pelaku utama sejak tahap perencanaan sampai evaluasi kegiatan pariwisata. Melalui keterlibatan ini pariwisata tidak hanya sebagai menarik minat kunjungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga nilai budaya setempat (Kurniawan et al., 2022). Maka dari itu pengembangan Wisata Mloko Jajar perlu diarahkan pada model yang mampu menggabungkan aspek sosial ekonomi dan budaya secara berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata upaya ini perlu didukung oleh kemudahan akses, ketersediaan fasilitas yang memadai serta strategi pemasaran yang efektif. Akses yang baik mendorong peningkatan jumlah wisatawan sementara fasilitas yang lengkap memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Promosi yang dilakukan secara langsung maupun digital membantu memperluas jangkauan pasar dan mengenalkan Mloko Jajar sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara terarah berbasis kondisi lapangan agar keberlanjutan wisata dapat terjaga.

BUMDes Desa Pupus berperan penting dalam pengelolaan wisata Mloko Jajar. Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa secara langsung sejak tahap pengelolaan hingga perawatan. Langkah ini mendorong partisipasi warga sekaligus menjaga keberlanjutan wisata melalui pengelolaan tersebut BUMDes diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga sekitar wisata.

Pengembangan Wisata Mloko Jajar di Desa Pupus bertumpu pada kekuatan potensi alam yang masih terjaga serta dukungan kelembagaan desa yang berjalan cukup aktif. Proses pengelolaan melibatkan berbagai aktor lokal, di mana pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi kebijakan, BUMDes Sumber Makmur mengelola aspek usaha, Pokdarwis menjalankan kegiatan teknis di lapangan, dan masyarakat berkontribusi melalui modal sosial yang mendukung keberlangsungan wisata. Pola kerja sama ini menunjukkan praktik tata kelola kolaboratif yang menekankan partisipasi bersama dan pembagian peran antaraktor. Meskipun demikian, pengembangan wisata ini masih menghadapi sejumlah kendala terutama pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan pendanaan untuk pengembangan fasilitas, serta belum meratanya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, koordinasi dan komitmen antaraktor belum sepenuhnya berjalan konsisten sehingga berpotensi memengaruhi keberlanjutan pengelolaan wisata. Oleh karena itu, meskipun kolaborasi telah terbentuk, penguatan kapasitas aktor, peningkatan komitmen bersama, dan penataan kelembagaan yang lebih efektif tetap diperlukan agar Wisata Mloko Jajar dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Pupus.

Penelitian ini mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari beberapa penelitian terdahulu yang akan dipaparkan pada penelitian kali ini akan ada pembeda dari peneliti-peneliti lainnya. Penelitian terdahulu membantu peneliti menyusun kerangka teoritis yang kuat untuk penelitian mereka. Kerangka teoritis ini menjadi landasan teoritis yang mengarahkan analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

Pertama, Aeni et al., (2021) yang berjudul “Sinergitas Bumdes dalam Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan” Dalam sektor pariwisata, Saat ini, banyak daerah mulai mengembangkan pariwisata berkelanjutan sebagai alternatif dari pariwisata massal. Pendekatan

ini diarahkan untuk memperkuat manfaat pariwisata sekaligus menekankan dampak positif bagi masyarakat desa dan lingkungan. Desa Munding di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang memiliki potensi wisata yang cukup beragam antara lain Air Terjun Wening, Air Terjun Wati serta wisata religi Makam Syekh Syarif. Tetapi potensi tersebut belum dikelola secara optimal sehingga diperlukan upaya pengelolaan yang lebih terarah agar desa wisata memiliki tata kelola yang baik. Kegiatan pengabdian ini menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia, pengabdian infrastruktur dan peningkatan partisipasi masyarakat. Penguatan sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan desa wisata. Sementara itu rendahnya partisipasi diatasi dengan melibatkan seluruh unsur pendukung desa wisata terutama BUMDes dan pengrajin lokal di Desa Munding. Melalui kolaborasi tersebut Desa Munding diharapkan mampu berkembang sebagai destinasi wisata yang lebih menarik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et al., (2021) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dengan informan yang langsung terlibat dalam pengelolaan Objek Wisata Puncak Sosok dan pengamatan terhadap lokasi dan aktivitas pariwisata. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menyusun dan menyajikan informasi secara sistematis dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. Penelitian ini berfokus pada strategi pengembangan Desa Wisata Puncak Sosok sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Puncak Sosok berjalan efektif melalui pemanfaatan potensi alam, penerapan strategi yang tepat dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik keberhasilan ini tidak terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengembangan. Temuan ini menunjukkan e-marketing menjadi strategi yang tepat untuk mendukung pengembangan desa wisata. Pengembangan Desa Wisata Puncak Sosok berawal dari kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata di wilayahnya yang kemudian diperkuat oleh peran aktif pemerintah desa dalam melibatkan pemuda.

Ketiga, penelitian Lubis et al., (2020) Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, khususnya tinjauan literatur, untuk menganalisis dan menafsirkan hasil penelitian yang ada dari jurnal nasional dan



internasional mengenai pengembangan pariwisata. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan bahan bacaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis difokuskan pada keterkaitan masalah untuk menyusun uraian deskriptif yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya paket wisata “Wisata Batik Terpadu” di Desa Telaga Biru. Paket ini menggabungkan sekolah batik permainan tradisional madura pertunjukan seni kuliner khas lokal serta akomodasi dengan konsep Tanean Lanjhang. Model pariwisata ini dikembangkan untuk menjaga identitas budaya nilai sosial dan kearifan lokal desa sekaligus melalui enam taham yaitu: peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan berbasis pariwisata masyarakat pemetaan sumber daya manusia pembentukan lembaga pengelolaan pariwisata desa penguatan kerja sama dengan dinas pariwisata dan investor kolaborasi dengan agen perjalanan serta promosi melalui media sosial dan situs web resmi. Kesimpulannya menekankan bahwa desa Telaga Biru memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi desa pariwisata mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam, sosial, dan buaatannya, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui penawaran pariwisata terpadu ini.

## **2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu,

1. Bagaimana model pengembangan Wisata Mloko Jajar di Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana keterkaitan antar aktor dalam pengembangan kalasan wisata di Mloko Jajar?

## **3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan model pengembangan Wisata Mloko Jajar di Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan wisata Mloko Jajar.

## **4.1 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dengan memperkaya studi pariwisata, khususnya dalam pengembangan desa pariwisata berbasis komunitas. Selain itu, hasil studi ini dapat digunakan sebagai acuan akademik untuk penelitian lebih lanjut dalam merumuskan model pengembangan desa pariwisata berkelanjutan yang melihat integrasi aspek sosial budaya

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat setempat sebagai dasar untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengembangkan pariwisata di Mloko Jajar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memaksimalkan potensi alam dan budaya Desa Pupus guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Selain itu, pengembangan yang dilakukan juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dan upaya pelestarian lingkungan serta nilai-nilai budaya desa.

## **5.1 Penegasan Istilah**

### **1. Pengembangan Wisata**

Pengembangan wisata dilakukan untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata agar lebih menarik bagi wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal upaya ini tidak hanya memanfaatkan potensi alam dan budaya tetapi juga menekankan pada terciptanya pengalaman wisata yang nyaman dan bernilai. Pada Wisata Mloko Jajar pengembangan pariwisata menempatkan masyarakat sebagai aktor utama yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pemasaran dan evaluasi. Melalui keterlibatan ini masyarakat tidak lagi sebagai pelengkap melainkan pelaku utama yang merasakan langsung manfaatnya.



## **2. Wisata Berkelanjutan**

Wisata berkelanjutan adalah upaya pengelolaan destinasi wisata yang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Tujuannya supaya kegiatan wisata memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal tanpa merusak alam maupun nilai budaya. Konsep ini diterapkan pada Wisata Mloko Jajar melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga tradisi setempat serta pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Pengembangan wisata juga disesuaikan dengan daya tampung pengunjung supaya kelestarian lingkungan dan budaya desa tetap terjaga.

## **3. Wisata Alam**

Wisata alam memanfaatkan keindahan lingkungan sebagai daya tarik utama sehingga pengunjung dapat menikmati alam sekaligus mengenal ekosistem dan budaya setempat. Wisata Mloko Jajar di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo mengandalkan panorama telaga dan perbukitan yang masih alami serta potensi alam lokal yang khas. Pengembangannya diarahkan pada prinsip keberlanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan agar seimbang alam tetap terjaga. Masyarakat dilibatkan secara aktif melalui BUMDes sebagai pengelola agar wisata tidak hanya berjalan secara ekonomi tetapi juga bertanggung jawab terhadap alam. Kegiatan seperti agrowisata dan edukasi lingkungan menjadi sarana untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, Wisata Mloko Jajar tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata tetapi juga sebagai media pemberdayaan masyarakat pembelajaran lingkungan dan pelestarian budaya lokal.

## **4. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)**

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk mengelola potensi lokal secara mandiri termasuk sektor pariwisata dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks wisata Mloko Jajar BUMDes berperan langsung sebagai pengelola fasilitas. BUMDes juga menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah desa dan pihak swasta agar pengelolaan wisata berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan peran tersebut pemanfaatan sumber daya desa dapat

dilakukan secara tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

## **6.1 Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung dan memperkuat penelitian ini, peneliti merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi baik secara tema, objek, maupun pendekatan. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan dalam memahami posisi dan kontribusi penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syaifudin & Ma'ruf, (2022) dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata” ini bertujuan menganalisa peran Pemerintah Desa Jurug dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata Jurug. Meskipun Pemerintah Desa Jurug memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan untuk mengembangkan desa wisata, mereka masih kurang dalam menerapkan program dan memberikan pembinaan. Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya tindak lanjut sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, alokasi dana yang terbatas, serta masalah limbah hewan yang mencemari aliran sungai. Pemerintah Desa Jurug telah melaksanakan pelatihan di bidang ekonomi, kepemudaan, dan keagamaan. Namun, pelatihan di sektor kepemudaan masih kurang karena tidak adanya lembaga kepemudaan yang dapat menampung partisipasi pemuda dalam program-program yang dijalankan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat perannya dalam implementasi kebijakan, mengatasi hambatan- hambatan yang ada, dan menyediakan fasilitas yang mendukung untuk pemuda serta kegiatan keagamaan.

Kedua Aeni et al., (2021) yang berjudul “Sinergitas Bumdes dalam Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan” Dalam sektor pariwisata, Setiap daerah kini mulai mengembangkan pariwisata berkelanjutan sebagai alternatif dari pariwisata massal. Tujuan pendekatan ini untuk memperkuat manfaat pariwisata bagi masyarakat sekaligus menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Desa Munding di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang memiliki potensi wisata alam dan religi yang cukup beragam seperti Air Terjun Tirto Wening dan Air Terjun Tirto wati Bukit serta Makam Syekh Syarif. Namun potensi tersebut belum dikelola secara maksimal sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih terarah agar desa wisata dapat berkembang dengan tat kelola yang baik. Kegiatan pelayanan masyarakat difokuskan pada penguatan sumber daya manusia, perbaikann infrastruktur dan peningkatan partisipasi warga sekitar. Pengembangan sumber daya manusia

dilakukan melalui penyebaran informasi serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan desa wisata. Sementara itu, perbaikan infrastruktur dilakukan dengan pembaikan fasilitas yang ada dan pemantauan secara berkala untuk menjaga kualitasnya. Partisipasi masyarakat yang rendah ditangani dengan mengintegrasikan semua elemen yang mendukung desa wisata, terutama Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan pengrajin lokal di Desa Munding. Melalui penguatan ketiga aspek ini, diharapkan Desa Munding dapat berkembang menjadi desa wisata yang lebih menarik dan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, Menurut Imama et al., (2024) tata kelola dalam pengembangan desa wisata di desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ini sudah dilakukan dengan baik. Namun, masih ada kendala pada dialog tatap muka dan juga komitmen terhadap proses dalam tata kelola di desa wisata “Edu Wisata Lontar Sewu” tidak dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Hendrosari dengan Masyarakat Hendrosari yang berjalan sesuai dengan perannya saja, melainkan juga membutuhkan peran dari pihak Stakeholder lainnya secara langsung dan tidak melalui media sosial. Selain itu, Stakeholder lain harus bertanggung jawab secara langsung daripada menggunakan media sosial. Jadi, meskipun diskusi langsung antara para Stakeholder selama proses tata kelola ini telah dilakukan, itu belum sepenuhnya berhasil karena beberapa di antara mereka masih belum memberikan pengetahuan secara langsung tentang pentingnya komunikasi dan pengetahuan yang dapat membantu meningkatkan sumber ekonomi kehidupan di desa wisata ini.

Keempat, penelitian Gautama et al., (2020) Penelitian ini menyoroti permasalahan pengembangan desa wisata di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, yang belum optimal. Penelitian menunjukkan pengembangan desa wisata oleh pemerintah desa belum maksimal dukungan dan promosi yang diberikan masih terbatas. Hambatan utama berasal dari anggaran yang minim dan rendahnya partisipasi masyarakat sehingga potensi desa wisata belum sepenuhnya tergali. Pemerintah desa terus berupaya mengatasi dengan meningkatkan promosi, merikan bantuan anggaran bagi pengelola dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong pengembangan desa wisata.

Kelima, penelitian Subarkah & Amelia, (2023) Desa Wisata Candirejo yang terletak di sekitar kawasan Candi Borobudur telah menyadari potensi wisata yang dimilikinya dan berupaya mengembangkannya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai



dampak yang muncul akibat aktivitas pariwisata di desa tersebut, baik positif maupun negatif, karena pemantauan terhadap dampak pariwisata sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat lokal dan memastikan keberlanjutan sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam dan tinjauan literatur untuk mengkaji pengembangan pariwisata di Desa Wisata Candirejo. Penelitian ini menyoroti aspek sosial budaya dan lingkungan aktivitas pariwisata terbukti meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperkuat interaksi antar penduduk serta mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Secara keseluruhan, pariwisata di Desa Wisata Candirejo memberikan dampak positif yang nyata terhadap budaya dan keberlanjutan lingkungan masyarakat sekitar.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Saragi (2022) Pengembangan desa wisata sebagai alternatif dipengaruhi oleh tiga prinsip yaitu: keanggotaan terbuka, manajemen demokratis dan kemandirian desa. Dengan akses yang mudah meningkatkan minat kunjungan sementara fasilitas umum dan sarana wisata yang memadai memberi rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor penting untuk menumbuhkan kreativitas dan semangat dalam pengelolaan pariwisata. Daya tarik dan keunikan destinasi wisata perlu diperkuat melalui strategi pemasaran yang tepat agar mampu menarik lebih banyak pengunjung. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji pengembangan desa wisata secara mendalam dan berkelanjutan. Pengelolaan yang kurang optimal dapat menghambat perkembangan desa yang memiliki potensi wisata. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan daya saing pariwisata di Indonesia mencerminkan potensi besar desa wisata dalam memperkuat perekonomian desa. Pemberdayaan masyarakat dan promosi yang konsisten menjadi kunci untuk meningkatkan jumlah wisatawan sekaligus menjaga keberlanjutan destinasi wisata alternatif.

Ketujuh, penelitian Ramadhani et al., (2021) Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, memanfaatkan metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan Attractions Peak Figure, serta pengamatan lokasi dan kegiatan pariwisata. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menyusun informasi secara sistematis dan menjelaskan secara jelas kepada pembaca. Penelitian ini bertujuan menggambarkan strategi pengembangan desa wisata Puncak Sosok mengidentifikasi kendala yang muncul dan memberikan solusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembangunan desa wisata

berjalan efektif. E-marketing terbukti menjadi strategi pengembangan yang tepat serta kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata daerah mendorong keterlibatan pemuda dan solidaritas komunitas. Keberhasilan dilihat dari penghargaan yang diterima menjadikan Puncak Sosok Juara nasional di tingkat perintis dan masuk 10 besar destinasi unggulan kepulauan. Keberhasilan ini diharapkan dapat memotivasi inovasi lebih lanjut dan pengembangan produk untuk mempertahankan keberadaan daya tarik.

Kedelapan, penelitian Lubis et al., (2020) Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, khususnya tinjauan literatur, untuk menganalisis dan menafsirkan hasil penelitian yang ada dari jurnal nasional dan internasional mengenai pengembangan pariwisata. Pengumpulan data melibatkan pengumpulan literatur dan bahan bacaan yang terkait langsung dengan tujuan penelitian, dengan analisis berfokus pada relevansi dan kedekatan masalah untuk merumuskan narasi deskriptif. Temuan utama dari studi ini adalah formulasi paket wisata batik terpadu di Desa Telaga Biru. Paket ini menawarkan kelas batik, permainan tradisional Madura dan pertunjukan seni serta akomodasi dengan konsep Tanean Lanjhang. Model ini bertujuan melestarikan nilai identitas dan kearifan lokal dengan melibatkan berbagai pihak lintas sektor. Implementasinya dilakukan enam tahap: meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan berbasis *CBT*, mengumpulkan data sumber daya manusia untuk pariwisata, membangun lembaga pengelola pariwisata desa, memperkuat kerjasama dengan lembaga pariwisata dan investor, berkolaborasi dengan agen perjalanan serta mempromosikan desa melalui media sosial dan situs web. Hasil penelitian menunjukkan Desa Telaga Biru berpotensi menjadi desa wisata mandiri dengan memaksimalkan sumber daya alam dan buatan manusia sehingga kesejahteraan dan kemandirian masyarakat meningkat melalui pariwisata terpadu.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Revida et al., (2023) Mengkaji peran tata kelola BUMDes dalam pengembangan desa wisata di Samosir, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui analisis statistik berganda untuk mengukur pengaruh tata kelola BUMDes terhadap pengembangan desa wisata. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara dan observasi guna memperdalam pemahaman serta memperkuat hasil analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan BUMDes memberi kontribusi positif terhadap pengembangan desa wisata. Semua elemen tata kelola seperti keterbukaan, transparansi, akuntabilitas dan kemandirian berdampak positif dengan

transparansi sebagai faktor yang paling dominan. Analisis data statistik memperlihatkan bahwa 78,14 persen variasi dalam pengembangan desa wisata dijelaskan oleh model tata kelola BUMDes. Studi ini menegaskan bahwa tata kelola BUMDes yang baik penting dalam mendorong pengembangan desa wisata. Temuan kualitatif menyoroti peran tata kelola kewirausahaan dan partisipasi masyarakat serta modal sosial sebagai faktor pendukung utama. Oleh karena itu, tata kelola BUMDes yang efektif merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan pariwisata desa yang berkelanjutan.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Nurlena et al., (2021) Menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk menyelidiki dampak sosial-budaya pengembangan pariwisata pedesaan terhadap komunitas tuan rumah di Desa Tanjung, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola pariwisata desa dan warga desa, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta pengamatan lapangan langsung. Pariwisata pedesaan memberikan dampak positif bagi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat termasuk perempuan. Aktivitas ini juga memfasilitasi interaksi antara tuan rumah dan pengunjung meski bersifat permukaan. Dari sisi budaya, pariwisata membantu melestarikan seni dan tradisi lokal mendorong kebangkitan beberapa pertunjukan tradisional. Pengembangan pariwisata di Desa Tanjung masih menghadapi sejumlah tantangan terutama pengelolaan pariwisata yang bersifat dualistik serta persepsi positif mengenai pembagian manfaat ekonomi yang berpotensi memicu konflik di tingkat komunitas. Secara umum pariwisata pedesaan telah membawa dampak sosial budaya yang positif seperti meningkatnya partisipasi masyarakat dan terjaganya nilai budaya lokal serta hubungan yang lebih dalam antara masyarakat setempat dan wisatawan. Tantangan dalam manajemen dan pemerataan manfaat ekonomi tetap perlu mendapat perhatian supaya pengembangan pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan.

## **7.1 Landasan Teori**

Penelitian ini menggunakan Teori Tata Kelola Kolaboratif. Pendekatan ini mendorong pengelolaan secara bersama oleh pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal dan pihak non pemerintahan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah publik. Pendekatan ini menekankan tata kelola yang dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan pihak non pemerintah dalam



proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah publik (Ansell & Gash, 2008). Model ini dibangun lewat dialog terbuka, kepercayaan bersama dan pembagian peran yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengembangan wisata desa Collaborative governance memastikan keputusan strategis dibuat secara partisipatif dan melibatkan semua pihak yang mengelola destinasi.

Tata kelola kolaboratif merupakan bentuk kerja sama antar sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan antaraktor, cara berkomunikasi, tingkat partisipasi dan pembagian peran dalam pengembangan Wisata Mloko Jajar. Pendekatan ini menunjukkan sinergi antar aktor mendukung pariwisata yang tidak hanya menarik pengunjung tetapi memberi manfaat ekonomi sosial dan budaya bagi masyarakat Desa Pupus dengan tata kelola kolaboratif menjadi landasan untuk memahami dinamika kerjasama dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Wisata Mloko Jajar.

Pemahaman mendalam tentang proses tata kelola kolaboratif juga memainkan peran penting dalam mengelola konflik potensial dan memperkuat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Proses kolaboratif mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan demokratis melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dengan keterlibatan ini, kolaborasi membuka peluang untuk solusi yang lebih berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan (Kasmianti, 2021). Selain itu, proses ini tidak hanya menghasilkan keputusan yang lebih akomodatif, tetapi juga meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan dan implementasi program yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Saleh et al., 2021).

Pengembangan Wisata Mloko Jajar di Desa Pupus membutuhkan tata kelola kolaboratif. Pariwisata pedesaan tidak akan berkembang tanpa kerja sama antara pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Desa, Pokdarwis, masyarakat lokal dan sektor swasta yang terlibat aktif. Keterlibatan semua pihak mendorong pengelolaan pariwisata yang transparan, inklusif dan berkelanjutan.

### **1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)**

Kondisi awal mencakup kepercayaan antar pihak dan kapasitas masing masing pihak. Faktor ini menjadi dasar kesiapan untuk kolaborasi yang efektif dalam pengembangan Wisata Mloko Jajar kondisi awal terlihat dari hubungan antar pemerintah desa, pokdarwis dan masyarat sekitar sebelum program dimulai. Menilai kondisi awal penting karena kualitas interaksi dan modal sosial yang ada akan menentukan partisipasi, koordinasi dan keberhasilan kolaborasi dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.

### **2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)**

Desain kelembagaan adalah bagian penting dalam *collaborative governance* yang mencakup aturan, struktur organisasi, mekanisme kerja dan pembagian seluruh peran aktor yang terlibat. Desain kelembagaan yang baik menjadi pedoman operasional untuk memastikan koordinasi berjalan lancar dan tanggung jawab yang jelas. Di Desa Pupus pengembangan Wisata Mloko Jajar menunjukkan hal ini melalui SOP pengelolaan destinasi wisata pembagian tugas pengelola wisata, struktur organisasi Pokdarwis dan lembaga desa serta regulasi desa yang mengatur praktik pengelolaan wisata. Semua elemen ini memperkuat tata kelola kolaboratif agar pengembangan wisata berjalan terarah, transparan dan berkelanjutan.

### **3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)**

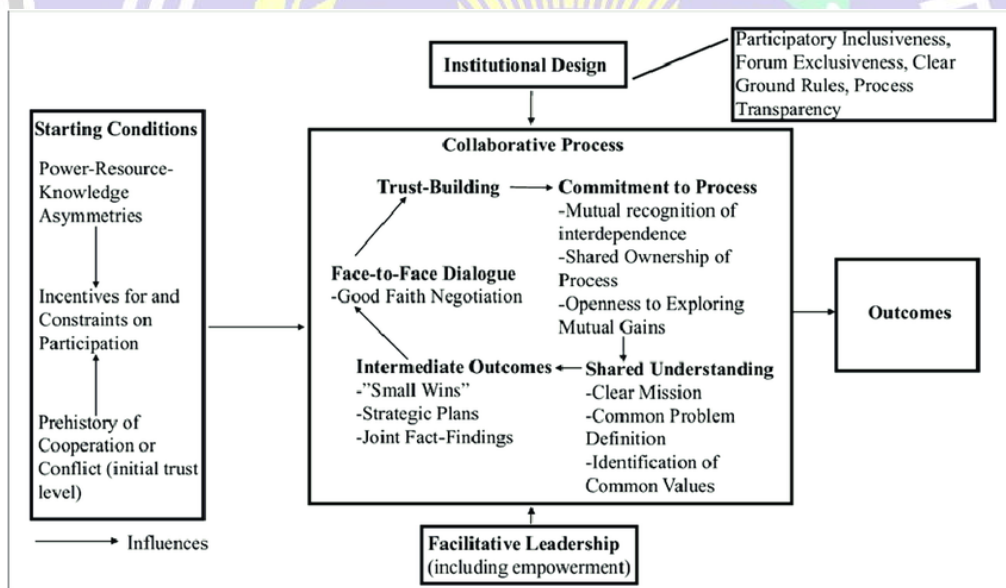
Kepemimpinan fasilitatif sangat penting dalam model tata kelola kolaboratif karena menempatkan pemimpin sebagai penggerak utama kolaborasi. Pemimpin berperan bukan hanya mengambil keputusan tetapi juga memfasilitasi partisipasi setara dari semua pemangku kepentingan. Mereka aktif mengatasi konflik dan memberi ruang bagi setiap pihak untuk mengekspresikan kepentingan dan kontribusinya. Dalam pengembangan Wisata Mloko Jajar di Desa Pupus hal ini dilihat dari keterlibatan kepala desa dan ketua pokdarwis yang membangun komunikasi terbuka berperan menjembatani antara berbagai kepentingan dan mengoordinasikan pemerintah desa, komunitas dan pihak eksternal. Kepemimpinan inklusif dan adaptif ini

menjadi dasar terciptanya kolaborasi harmonis dan berfokus pada pengembangan Wisata Mloko Jajar.

#### 4. Proses Kolaboratif (*Collaborative Procces*)

Proses ini meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen dan pencapaian hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini dilihat dari berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi antarpemangku kepentingan, penyusunan program wisata bersama masyarakat dan evaluasi rutin pengelolaan wisata. Semua aktivitas menunjukkan upaya bersama menciptakan hubungan kerja harmonis, meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata dan memastikan manfaat pengembangan wisata oleh semua pihak.

Gambar 1. 1 Model Collaborative Governance



Sumber: (Ansell & Gash, 2008)

### 8.1 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian pengembangan Model Wisata Mloko Jajar merupakan penjabaran rinci mengenai variabel-variabel penelitian agar dapat diukur secara jelas, sistematis, dan sesuai dengan konteks lapangan.



Definisi ini memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan setiap komponen dalam model *Collaborative Governance* serta bagaimana elemen-elemen tersebut diidentifikasi melalui indikator yang dapat diamati di Mloko Jajar. Melalui definisi operasional, penelitian ini memastikan bahwa aspek-aspek seperti kondisi awal para aktor, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif dapat diterjemahkan ke dalam bentuk perilaku, mekanisme, dan kegiatan nyata yang terjadi pada pengelolaan wisata. Dengan demikian, definisi operasional berfungsi sebagai pedoman untuk menilai tingkat efektivitas kolaborasi yang berlangsung antara pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, dan pihak eksternal dalam mendukung pengembangan Wisata Mloko Jajar secara terukur dan terarah.

### **1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)**

Dalam studi ini, kondisi awal diartikan sebagai kesiapan pemangku kepentingan untuk mengembangkan Wisata Mloko Jajar. Kesiapan ini dilihat dari kepercayaan antar pihak dan hubungan kerja yang lancar. Perhatian juga diberikan pada distribusi kekuasaan yang seimbang serta kemampuan sumber daya masing-masing aktor yang terlibat. Pemerintah desa, pokdarwis dan masyarakat sekitar siap berkolaborasi jika ada kepercayaan, hubungan yang harmonis dan kapasitas untuk berpartisipasi aktif.

### **2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)**

Aturan dan struktur organisasi yang mengatur pengelolaan Wisata Mloko Jajar. Desain kelembagaan mencakup Prosedur Operasional Standar (*SOP*), pembagian peran, alur koordinasi dan peraturan desa terkait pengelolaan pariwisata. Variabel ini efektif jika aturan diterapkan konsisten dapat dipahami semua pemangku kepentingan dan mampu menciptakan tata kelola yang jelas, transparan dan mendukung kerja sama.

### **3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)**

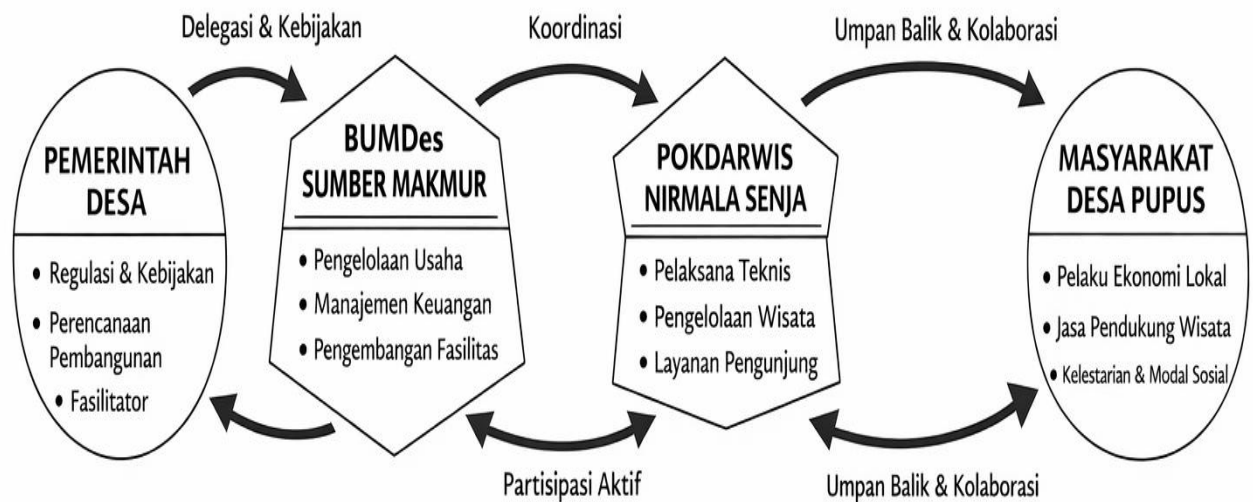
Kemampuan seseorang pemimpin untuk memfasilitasi dan menjaga kelancaran kolaborasi dalam pengembangan pariwisata. Kemampuan ini dilihat dari komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Seorang pemimpin

dianggap efektif jika mampu menciptakan suasa yang baik dan menjaga hubungan antar aktor yang terlibat serta memastikan setiap pihak dapat menyampaikan aspirasi dan menjalankan perannya dalam proses kolaborasi.

#### 4. Proses Kolaboratif (*Collaborative Procces*)

Dioperasionalkan sebagai proses interaksi antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Mloko Jajar. Interaksi tersebut berlangsung melalui dialog tatap muka yang membangun kepercayaan dan komitmen bersama sehingga tercipta pemahaman yang sama terhadap tujuan pengembangan wisata. Proses kolaborasi ini terlihat dari adanya hasil nyata seperti penyusunan program wisata kegiatan kerja bakti dan evaluasi pengelolaan destinasi. Variabel ini dinilai efektif apabila interaksi antar aktor berjalan secara partisipatif terbuka dan mampu menghasilkan keputusan bersama yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Gambar 1. 2 Model Keterlibatan Aktor dalam Pengembangan Wisata Mloko Jajar di Desa Pupus



Sumber: Data Diolah Dari Dokumen Lapangan

## 9.1 Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data naratif yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah proses pengembangan Wisata Mloko Jajar yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan juga lembaga pengelola BUMDes serta Pokdarwis. Penelitian bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan kondisi nyata termasuk hambatan dan strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat Desa Pupus. Dengan cara ini peneliti dapat memahami model pengembangan yang sesuai dengan karakter wilayah dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wisata Mloko Jajar Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena Desa Pupus telah mengembangkan potensi pariwisata alam yang dikelola oleh BUMDes. Tetapi, pengelolaan wisata masih menghadapi kendala dalam manajemen, fasilitas dan promosi. Wisata Mloko Jajar juga mencerminkan desa wisata berbasis komunitas sehingga sesuai dengan tujuan penelitian tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan.

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Subjek utama dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 1. 1 Daftar Informan

No	Informan	Jabatan/Peran	Alasan Pemilihan
1.	Sekertaris Desa Pupus	Pemerintah Desa	Memiliki kewenangan dan kebijakan dalam pengembangan wisata desa



2.	BUMDes Desa Pupus	Pengelola utama wisata Mloko Jajar	Bertanggung jawab terhadap manajemen dan keuangan wisata
3.	Ketua Pokdarwis	Pelaksana teknis lapangan	Terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan wisata
4.	Masyarakat Desa Pupus	Pelaku ekonomi sekitar wisata	Berperan dalam aktivitas ekonomi wisata dan menjaga keberlanjutan destinasi

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

- a) Sekretaris Desa Pupus sebagai representasi Pemerintah Desa memiliki peran sentral sebagai regulator dan fasilitator kebijakan. Dalam penelitian ini, perspektifnya menjadi kunci untuk memahami aspek legal-formal dan kerangka kebijakan yang mendasari pengembangan Wisata Mloko Jajar. Informasi yang diberikan akan mengungkap bagaimana wisata diatur melalui peraturan desa, diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes, serta difasilitasi melalui koordinasi dengan pihak eksternal. Melalui informan ini, penelitian dapat menilai tingkat komitmen politik dan dukungan kelembagaan dari pemerintah desa, yang merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan dan legitimasi program pengembangan pariwisata.
- b) BUMDes Desa Pupus sebagai pengelola utama bisnis pariwisata di desa. BUMDes bertanggung jawab untuk mengubah potensi pariwisata desa menjadi sumber ekonomi yang menghasilkan untuk desa. Narasumber dari BUMDes menjadi kunci untuk memahami kewirausahaan sosial dan manajemen keuangan. Data yang dikumpulkan menjelaskan model bisnis dan strategi pemasaran serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Dengan perpektif ini studi menilai kelayakan ekonomi dan pengembangan usaha BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa berbasis pariwisata.
- c) Ketua Pokdarwis disini bertugas langsung mengelola kegiatan pariwisata di lapangan. Dari pengalamannya penelitian ini dapat menampilkan praktik manajemen sehari-hari mulai dari pemeliharaan fasilitas sampai pelayanan pengunjung. Selain itu, data dari pokdarwis juga mengungkap dinamika internal kelompok seperti pembagian tugas, kapasitas sumber daya manusia, motivasi anggota, dan kendala teknis

yang dihadapi. Informasi ini penting untuk menilai kualitas layanan dan keberlanjutan operasional destinasi wisata.

- d) Masyarakat Desa Pupus berperan sebagai pelaku ekonomi di sekitar kawasan wisata sekaligus sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari pengembangan destinasi. Pandangan masyarakat sangat penting dalam menunjukkan dampak sosial dan ekonomi pariwisata. Dari pandangan warga penelitian bisa bernilai manfaat yang dirasakan dan sejauh mana pengembangan wisata berlangsung inklusif dan berkelanjutan. Informan juga membantu memetakan perubahan ekonomi rumah tangga misalnya peningkatan pendapatan dari usaha pendukung wisata serta melihat fenomena sosial seperti kesenjangan dan konflik penggunaan sumber daya.

Peneliti memilih subjek ini karena mereka merupakan pihak yang memiliki keterlibatan dan pemahaman mendalam terhadap pengelolaan dan pengembangan wisata desa.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Wawancara

Wawancara secara langsung dengan informan seperti kepala desa, pengelola BUMDes, ketua pokdarwis dan anggota masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai strategi pengelolaan pariwisata, hambatan yang dihadapi dan pandangan masyarakat terhadap pengembangan Wisata Mloko Jajar.

- b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi data yang dikumpulkan meliputi profil desa, laporan BUMDes, data kunjungan wisatawan, foto aktivitas pariwisata dan peta lokasi. Dokumen ini digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data memegang peran penting dalam penelitian karena berfungsi mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna serta membantu menjawab rumusan masalah. Ketepatan dalam memilih teknik analisis data akan sangat menentukan kualitas dan validitas kesimpulan penelitian yang dihasilkan. Menurut Miles et al., (2014) bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

### a) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena menjadi dasar utama proses analisis. Pada bagian ini peneliti mengumpulkan informasi yang sesuai dengan objek penelitian terutama data kualitatif deskriptif. Kualitas data hal yang sangat menentukan hasil penelitian sehingga data yang dikumpulkan harus akurat dan lengkap agar kesimpulan yang dihasilkan dapat digunakan.

### b) Kondensasi data (*Condesation Data*)

Kondensasi data adalah proses pengolahan data kualitatif dengan memilih dan menyederhanakan data yang diperoleh. Tujuan utamanya untuk mengubah data menjadi lebih terfokus dan mudah untuk dipahami. Dalam proses ini peneliti fokus pada data yang sesuai serta merangkum informasi yang penting dan juga mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih bermakna sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### c) Penyajian Data (*Data Display*)

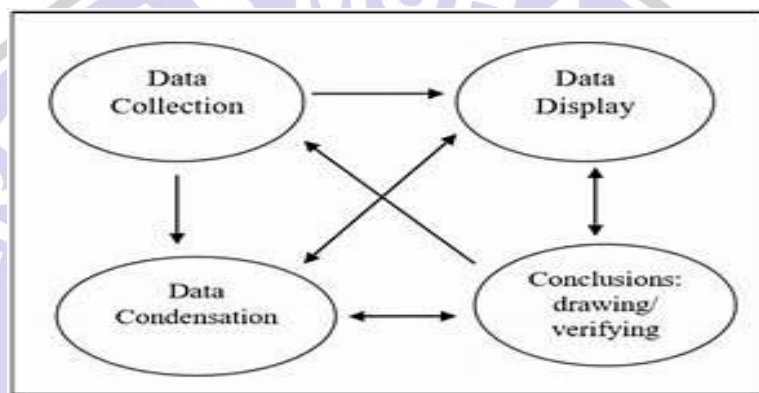
Penyajian data adalah langkah yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data secara lebih jelas dan sistematis. Data mentah diolah ke dalam bentuk yang lebih informatif sehingga peneliti dan pembaca dapat dengan mudah untuk melihat hubungan dan makna yang muncul dari hasil penelitian.



d) Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion/Verification*)

Kesimpulan merupakan bagian akhir dari proses penelitian yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan peneliti berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan harus ditulis dengan jelas dan ringkas agar mudah dipahami. Verifikasi dilakukan untuk memastikan temuan penelitian benar, konsisten dan dapat diandalkan sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang baik.

Gambar 1. 3 Analisis Data Model Miles And Huberman



Sumber: Miles et al., (2014)

## 6. Keabsahan Data

Keabsahan data ialah upaya atau tindakan untuk memberikan kepercayaan terhadap data yang diperoleh, yang nantinya data tersebut dapat dipercaya atau tidak dipercaya dan juga dipertanggung jawabkan. Untuk memberikan validitas data yang optimal, maka perlunya dilakukan uji keabsahan pada data.

Pada penelitian ini keabsahan data akan diuji dengan teknik Triangulasi. Dalam pengujian kredibilitas triangulasi diartikan sebagai pengecekan data yang berasal dari beberapa sumber informasi/data. Triangulasi dilakukan agar validitas data lebih terpercaya karena dengan pengujian data ini penelitian bisa lebih konkret dan terverifikasi. Pengujian data dengan teknik triangulasi dilakukan dengan pengujian data yang kemudian data tersebut dibandingkan atau dinilai dari hasil wawancara atau objek tertentu yang bersangkutan. Tipe triangulasi dikemukakan oleh Denzin (2017) bahwa

triangulasi memiliki empat hal, yaitu triangulasi antar penelitian, triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik triangulasi metode. Teknik ini menggunakan triangulasi metode yang dimana informasi itu dibandingkan dengan cara-cara yang berbeda. Dengan teknik ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode-metode pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. Metode ini digunakan sebagai bahan pengumpulan informasi yang valid dan kredibel.

